BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan termasuk dalam lingkup bisnis, yang mencakup mengenai produksi ataupun jual beli. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang beroperasi untuk melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Di dalam perusahaan terdapat kegiatan produksi yang kemudian perusahaan melakukan pendistribusian barang atau jasa kepada perusahaan lain untuk mendapatkan suatu keuntungan. Pendistribusian barang ataupun jasa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan diperoleh dari adanya hubungan atau relasi bisnis yang dilakukan dengan perusahaan lain. Hubungan bisnis yang dilakukan oleh antar perusahaan tersebut melibatkan adanya pertukaran informasi, barang, atau jasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis. Hubungan bisnis atau relasi bisnis yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan pelanggan, antar perusahaan, ataupun perusahaan yang memasok kebutuhan perusahaan tersebut.¹

Pentingnya dalam suatu hubungan bisnis atau relasi antar perusahaan terdapat pada pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan yang diberikan antar pihak yang bersangkutan, dan hubungan timbal balik yang menguntungkan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hubungan yang baik dalam relasi bisnis mampu

¹“Relasi Bisinis: Pengertian, Jenis, dan Manfaat.”, <https://www.bizhare.id/media/bisnis/relasi-bisnis#:~:text=Relasi%20bisnis%20merujuk%20pada%20hubungan,atau%20antara%20perusahaan%20dengan%20pemasok>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

memberikan nilai lebih bagi perusahaan tersebut, dan dapat memunculkan rasa kepercayaan yang tinggi pada rekan bisnis, serta memperkuat kolaborasi yang menghasilkan hubungan kerja berkelanjutan. Terdapat bergai faktor yang dapat mempengaruhi adanya hubungan bisnis yang baik diantaranya ialah komunikasi yang baik dan efektif, rasa saling menghormati yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap rekan bisnis, serta melakukan segala hal dengan jujur. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antar perusahaan, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan dan menghasilkan adanya pemberian project atau pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan yang saling bersangkutan.

Pemberian project atau pekerjaan dalam hubungan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa. Maka perusahaan membutuhkan adanya suatu kontrak, yang mana kontrak tersebut diberikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk tiap pihak yang berhubugan di dalamnya. Kontrak merupakan suatu alat yang sangat penting dalam perusahaan untuk melakukan berbagai hal khususnya dalam hal hubungan kerja atau bisnis. Kontrak merupakan suatu instrument utama untuk memberikan perlindungan hukum serta mengatur hak dan kewajiban diantara para pihak yakni perusahaan dengan mitra. Kontrak juga merupakan suatu perjanjian yang di berikan oleh perusahaan kepada mitra untuk dapat membangun suatu kepercayaan dan menghindari adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak yang mungkin akan terjadi dan merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.

Pembentukan suatu kontrak terdapat berbagai hal yang harus di cantumkan secara jelas dan dapat dimengerti kedua belah pihak yang bersangkutan, agar dapat melindungi hak-hak yang ada. Dalam suatu pembentukan kontrak perjanjian terdapat prinsip fundamental yang harus diterapkan di dalamnya. Yakni adanya penerapan asas-asas dalam kontrak perjanjian, dengan adanya penerapan asas-asas didalam suatu kontrak hal tersebut merupakan bentuk prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang harus dilakukan oleh tiap pihak untuk bertindak sesuai kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Penerapan asas didalam kontrak merupakan bentuk pedoman yang digunakan dalam pembuatan kontrak perjanjian itu sendiri. Dalam KUHPer (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) pengaturan mengenai hukum kontrak terdapat didalam buku III. Kontrak yang dibuat dalam suatu perjanjian termasuk hukum kontrak dijalankan dan dipatuhi oleh para pihak yang bersangkutan didalamnya.

Dasar hukum pembentukan kontrak terdapat didalam Pasal 1338 KUHPer, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak., dan perjanjian tidak dapat dibatalkan selain adanya kesepakatan, serta perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik. Sedangkan perjanjian dikatakan sah ketika telah memenuhi syarat sah perjanjian, yang mana telah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPer. Di dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut terdapat empat syarat sah perjanjian yakni adanya kesepakatan antar pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kontrak lahir karena adanya suatu hubungan hukum yang asalnya dari perikatan, dan perikatan lahir karena adanya suatu

perjanjian yang mana didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Hak dan kewajiban harus saling dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat didalam kontrak perjanjian tersebut, agar dapat terpenuhinya tujuan masing-masing pihak dalam kontrak tersebut. Yang mana kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pertama merupakan bentuk hak dari pihak kedua dalam kontrak tersebut dan begitu juga sebaliknya.² Maka dengan demikian hak dan kewajiban dalam suatu kontrak tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat jika hanya dilakukan salah satunya, karena hak dan kewajiban dalam suatu kontrak perjanjian merupakan suatu kesatuan yang harus dijalankan secara bersama.

Pelaksanaan kontrak perjanjian dalam suatu hubungan kerja atau rekan bisnis yang ada dilapangan, memiliki fakta bahwa terdapat beberapa peristiwa yang menyatakan kontrak perjanjian tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati diawal. Tidak terlaksananya kontrak perjanjian dapat disebabkan oleh bebrapa hal termasuk kurangnya pemahaman pada muatan kesepakatan yang telah disepakati. Terlaksananya kontrak perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, maka akan menimbulkan adanya suatu kendala dalam hubungan kerja atau bisnis tersebut. Kendala tersebut disebabkan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Perusahaan CV. Pahala Kencana merupakan pelaku usaha di Indonesia yang bergerak di dalam bidang produksi, mendistribusikan barang, dan jasa. Yang mana juga CV. Pahala Kencana juga bergerak didalam bidang desain interior yang

² Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia.", *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 7, Vol. 1, 2023, hlm. 918-924

mana pada pengerjaannya perusahaan ini melakukan hubungan kerja dengan suatu perusahaan yang bergerak didalam bidang property juga. CV.Pahala Kencana sebagai objek studi dalam penelitian ini, merupakan perusahaan yang seringkali melakukan dan membuat kontrak perjanjian hubungan kerja atau relasi bisnis. Dalam praktik lingkup perusahaan yang bergerak dalam bidang property. Kontrak perjanjian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang ada pada kontrak perjanjian tersebut. Meskipun telah terdapat kontrak perjanjian yang bersifat mengikat pada masing-masing pihak didalamnya, tidak menjamin bahwa wanprestasi oleh salah satu pihak tidak terjadi dalam kontrak perjanjian tersebut. Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ada didalam kontrak tersebut, selain itu juga wanprestasi dapat terjadi karena adanya kurang pemahaman.

Penelitian ini menggunakan isu hukum yang terjadi pada CV Pahala Kencana yang memiliki hubungan hukum dengan mitra yakni PT XY tersebut. Dalam hubungan kerja tersebut CV Pahala Kencana dengan PT XY terdapat suatu perjanjian kerja yang dituangkan didalam surat perintah kerja Nomor: 0084/JL/PMR-Prom/SPK-VI-I/III.24. surat perintah kerja atau SPK tersebut digunakan sebagai kontrak perjanjian dalam pengerjaan suatu proyek yang diberikan secara langsung oleh PT XY kepada pihak CV Pahala Kencana. Dalam kontrak perjanjian tersebut CV Pahala Kencana berlaku sebagai penerima pekerjaan yakni pihak kedua dan PT XY merupakan pihak pertama selaku pihak yang memberi pekerjaan. Namun pada fakta dilapangan tidak semua perjanjian akan berjalan dengan semestinya, yang mana dalam pelaksanaan kontrak perjanjian

tersebut terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT XY selaku pihak pertama, yang mana dalam berlangsungnya kontrak tersebut PT XY melakukan pelanggaran atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah tertuang didalam kontrak perjanjian yang berbentuk surat perjanjian kerja tersebut. Yang mana wanprestasi tersebut menimbulkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak kedua yakni CV Pahala Kencana.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji posisi serta bentuk perlindungan para pihak didalam suatu kontrak perjanjian surat perintah kerja yang menjadi kontrak hubungan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pahala Kencana dengan mitra. Dengan melakukan analisis studi kasus yang ada pada lapangan, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam suatu hubungan kerja atau bisnis. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kesadaran hukum serta etika di lingkup pelaku usaha. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM CV. PAHALA KENCANA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PT XY DALAM KONTRAK SURAT PERINTAH KERJA.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak surat perintah kerja Nomor : 0084/JL/PMR-Prom/SPK-VI-I/III.24?
2. Bagaimana perlindungan hukum CV. Pahala Kencana dalam kontrak surat perintah kerja Nomor : 0084/JL/PMR-Prom/SPK-VI-I/III.24?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada pada suatu kontrak perjanjian surat perintah kerja yang digunakan dalam kontrak hubungan kerja suatu perusahaan dengan mitra yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang diakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh mitra kepada perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pada suatu perusahaan yang diakibatkan adanya wanprestasi dalam kontrak kerja atau bisnis.
 - b. Penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan pemahaman teori hukum tidak hanya relevan untuk akademis dan praktisi hukum, tetapi juga bagi para pelaku usaha yang ingin memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dan kontrak kerja untuk membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan langsung kepada para praktisi hukum, dan juga para pelaku usaha dalam pembuatan kontrak kerja atau kontrak perjanjian bisnis.

- b. Rekomendasi yang dihasilkan dapat mengurangi adanya sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan mitra dalam lingkup hubungan kerja atau bisnis perusahaan dengan mitra.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penunjang dalam penulisan ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan
1.	Nurul Khalim dan Septi Indrawati, Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL), 2023. ³	Penelitian ini menyoroti mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur yang disebabkan oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pinjaman online dengan menganalisis pertimbangan hakim pada suatu putusan pengadilan negeri.	Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum yang dianalisis dari suatu putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum yang didapatkan suatu perusahaan yang diakibatkan

³Indrawati, S., & Khakim, N." Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt. G/2021/PN JKT. SEL)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum, No.2 Vol.2. 2023.*

			adanya wanprestasi yang dilakukan oleh mitra atau rekan hubungan bisnis
2.	Firyaal Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sahshi, Kristin Marsaulina. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 2024. ⁴	Penelitian ini membahas mengenai efektifitas perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi menggunakan sistem elektronik, dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah.	Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi <i>Online</i> . Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus pembahasan pada perlindungan hukum suatu perusahaan dalam suatu kontrak perjanjian hubungan bisnis ketika terjadi adanya wanprestasi.
3.	Merlin Kristin	Penelitian ini	Penelitian terdahulu

⁴Firyal.S, Priya.S, Ratnasari.S, Kristin.M, “Perlindungan HUKUM Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.”, *Jurnal Hukum Nusantara, No.2 Vol.1, 2024*.

	Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon. Judul: Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai. 2023. ⁵	memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum para pihak yang terlibat didalam kegiatan transaksi gadai, termasuk pihak pemberi gadai dan penerima gadai dengan dikaitkan pada hubungan perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perata di Indonesia.	membahas mengenai perlindungan hukum dalam kegiatan gadai. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum para pihak yang terlibat didalam surat perjanjian kerja atau bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mitra.
--	--	---	---

Kesimpulan dari adanya penelitian terdahulu, bahwa dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang dilakukan pada setiap masing-masing peneliti, yang mana pada penelitian terdahulu juga membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum. Namun pada setiap penelitian memiliki objek atau fokus penelitian yang berbeda-beda. Yakni pada peneliti pertama membahas mengenai perlindungan hukum pada kreditur pada pinjaman *Online* atau pinjaman menggunakan sistem elektronik, kemudian pada penelitian yang kedua memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum pada konsumen yang melakukan kegiatan transaksi pembelian suatu barang menggunakan sistem

⁵Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon." Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian gadai". *Jurnal Krisna Law, No.1, Vol. 5*. Februari 2023.

elektronik dengan ditinjau melalui Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah, dan pada penelitian yang ketiga memfokuskan pembahasan penelitian pada perlindungan hukum pada para pihak yang melakukan transaksi gadai barang. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku usaha atau suatu perusahaan oleh mitra selaku rekan hubungan kerja, pada suatu kontrak perjanjian yang berbentuk surat perintah kerja. Serta dalam penelitian yang penulis kaji ini lebih membahas dan mengkaji bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak perjanjian kerja tersebut yang tertuang didalam surat perintah kerja tersebut. Kemudian penulis juga memfokuskan pembahasan pada apakah hak-hak pelaku usaha atau perusahaan telah terpenuhi secara penuh dengan adanya kontrak perjanjian hubungan kerja yang tertuang dalam surat perintah kerja tersebut. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan merupakan bentuk kelengkapan atau melengkapi *literature* yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan sesuai konteks terhadap jaminan hukum yang diterapkan pada suatu perusahaan dengan adanya pemberian surat perintah kerja sebagai kontrak perjanjian pelaku usaha dengan mitra yang bersangkutan. Yang kemudian penelitian yang penulis kaji ini dapat melengkapi literature pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam kontrak perjanjian sesuai dengan KUHPer di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi memiliki berbagai pengertian, yakni logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari

prosedur dan teknik penelitian. Secara harfiah metodologi merupakan ilmu tentang metode. Metode adalah upaya untuk melakukan sesuatu dengan disesuaikan oleh karakter ilmu.⁶ Metodologi dapat dipengaruhi oleh permasalahan atau isu yang digunakan di dalam suatu penelitian. Menurut Terry Hutchinson menyatakan bahwa metode ilmu sosial hanya dapat digunakan dalam *fundamental research* yang memang hukum sebagai fundamental sosial. Yang mana *fundamental* reseacrh mengkaji mengenai fenomena hukum dalam praktek, tidak memberikan solusi, dan hanya deskriptif.⁷ Sedangkan menurut H. Abdurrahmat Fathoni pengertian metodologi merupakan ilmu yang memperoleh metode-metode ilmiah, sedangkan metodik merupakan suatu kumpulan metode yang dapat dipilih dalam melakukan pendalaman objek studi yang bersangkutan.⁸ Dalam hal ini, penulis menetapkan metode penelitian dengan tujuan mengumpulkan pengetahuan yang sesuai dengan permasalahan atau isu yang diteliti. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan kajian bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder. Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Scopindo, Surabaya, 2019, hlm.5

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 57.

mendapatkan bahan-bahan berupa teori, asas-asas hukum, konsep, serta peraturan hukum yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan topik pembahasan dalam kajian penelitian penulis. Menurut Van Apeldoorn penelitian kritis tentang isi hukum terletak dalam sifat khas hukum yaitu normatif.⁹

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif memiliki ruang lingkup yang tidak luas, yang mana ruang lingkup penelitian hanya pada sistematika hukum dan asas-asas hukum, mengkaji terhadap hukum secara vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰ Dalam penelitian yang penulis teliti ini ruang lingkup pembahasan dengan mengkaji sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Selain itu dalam penelitian yang penulis teliti ini juga bertujuan untuk menganalisis asas hukum yang terdapat didalam objek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*) yang lebih fokus pada pemahaman dan analisis mendalam terhadap fenomena

⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Scopindo, Surabaya, 2019, hlm.8.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

hukum yang terjadi. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian penulis yang ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada suatu perusahaan dalam suatu kontrak perjanjian kerja yang berbentuk surat perintah kerja tersebut. Melalui pendekatan kualitatif ini, penulis dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif dengan menggali pandangan melalui sisi hukum maupun sosial, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai permasalahan yang penulis teliti.

1.6.3 Sumber Data

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan objek penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen pendukung. Wawancara dilakukan dengan pemilik serta direktur perusahaan CV. Pahala Kencana. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk menggali atau mendapatkan suatu data informasi terkait dengan keberlangsungan kontrak perjanjian yang dijadikan objek dalam penelitian ini berjalan serta mengetahui peristiwa yang terjadi secara nyata dilapangan yang dapat menjadi sumber data pendukung.

Selain itu, observasi dilakukan di lokasi CV. Pahala Kencana di beroperasi yakni Kabupaten Sidoarjo untuk memahami lebih dalam mengenai isu yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dokumen kontrak perjanjian hubungan kerja yang berupa surat perintah kerja

antara CV. Pahala Kencana dengan mitra menjadi data primer utama yang akan menjadi data yang penulis gunakan untuk menggali analisis penulis terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan serta kedudukan para pihak didalam kontrak perjanjian tersebut.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber mendukung analisis dan pemahaman lebih mendalam mengenai topik yang penulis kaji dalam penelitian ini. Data sekunder meruju pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada, seperti dokumen kontrak perjanjian, buku-buku yang relevan dengan isu kajian yang penulis teliti, serta hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, buku, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merujuk dengan objek penelitian dari peraturan Perundang-undangan yakni KUHPer (KUHPerdata).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terkait dengan isu yang penulis kaji dalam penelitian ini mencakup literatur hukum yang menjelaskan mengenai teori dasar serta prinsip dalam kedudukan para pihak dalam suatu kontrak dan perlindungan hukum yang diberikan.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan melalui pendekatan terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, yang kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang telah terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan data yang berasal dari bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian *literature* yang mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan dan hukum perdagangan, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik serupa dengan kajian penulis. Selain itu, dokumen utama yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah kontrak perjanjian yang berupa surat perintah kerja yang digunakan oleh perusahaan CV. Pahala Kencana dengan mitra yang bersangkutan. Dokumen-dokumen tersebut memiliki peranan krusial dalam memeberikan informasi yang leih mendalam dan valid mengenai kenyataan secara langsung di

lapangan yang terjadi pada perusahaan ketika menerapkan asas itikad baik didalam kontrak jual beli yang dibuatnya.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penullis di Ruang Baca Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dan kemudian di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang terletak di Jalan Rungkut Madya, Nomor 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada pertengahan Januari 2025 dan mencakup serangkaian tahapan persiapan yang menyeluruh. Tahap pertama terdiri dari langkah-langkah administratif, antara lain pendaftaran penelitian, pengajuan serta persetujuan judul, dan permohonan surat kepada instansi yang relevan. Selanjutnya, peneliti menyusun proposal yang akan diajukan ke pihak terkait, termasuk pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dan pelaksanaan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Proses administratif juga dilakukan di instansi terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan penelitian. Setelah proposal selesai disusun, peneliti menjalani proses bimbingan dengan pembimbing, dilanjutkan dengan pengajuan untuk seminar proposal, pelaksanaan seminar proposal, serta revisi proposal berdasarkan masukan yang diperoleh

selama seminar tersebut.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab, yang mana masing-masing bab mencakup beberapa subbab. Penguraian bagian-bagian penelitian secara sistematis ini digunakan untuk memberikan kemudahan dalam memahami serta mengkaji permasalahan atau isu yang penulis kaji. Adapun sistematika penulisan yang penulis jabarkan sebagai berikut:

Bab pertama, memberikan penjelasan mengenai pengertian serta landasan teori mengenai asas itikad baik, khususnya dalam konteks kontrak jual beli. Pada sub bab ini penulis memberikan penjabaran mengenai landasan teoritis mengenai kontrak, dan memberikan penjelasan secara sempit khususnya mengenai kontrak perjanjian kerja atau bisnis. Dengan adanya penjabaran tersebut penulis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, fungsisi, dan ruang lingkup asas-asas sebelum menganalisis studi kasus. Di dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, adapun sub-bab pertama adalah latar belakang yang mana menguraikan alasan serta urgensi penelitian terhadap topik yang diangkat. Sub-bab kedua merupakan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi focus utama kajian. Kemudian, dalam sub-bab ketiga berisi tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Pada sub-bab keempat berisi manfaat penelitian

yang menguraikan manfaat teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian. Pada sub-bab kelima mengenai keaslian penelitian yang menjelaskan kontribusi dan kebaruan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, metodologi penelitian pada sub-bab keenam menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Terakhir, pada sub-bab ketujuh adalah tinjauan Pustaka yang mengkaji teori dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis penelitian ini.

Bab kedua, berisikan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama mengenai kedudukan para pihak dalam kontrak surat perintah kerja yang digunakan dalam kontrak perjanjian kerja antara CV. Pahala Kencana dengan mitra. Pada bab dua ini membahas mengenai kedudukan para pihak yang ada pada kontrak surat perintah kerja tersebut, dan dalam pembahasannya ini juga menyangkut mengenai analisis kedudukan para pihak yang berkaitan didalam kontrak perjanjian kerja berupa surat perintah kerja tersebut.

Bab ketiga, berisikan pembahasan dari rumusan masalah yang ke dua mengenai perlindungan hukum CV. Pahala Kencana dalam kontrak surat perintah kerja. Dalam bab ini terdapat dua sub-bab pembahasan yang pertama yakni mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada CV. Pahala Kencana dalam kontrak perjanjian yang berupa surat perintah kerja tersebut. Dan kemudian pada sub-bab yang

kedua membahas mengenai penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan dari tidak terlaksananya kontrak perjanjian dengan kesepakatan diawal.

Bab ke-empat, merupakan bagian penutup dari penelitian yang telah penulis laksanakan serta menjadi bagian akhir dalam rangkaian yang memuat kesimpulan sebagai rangkuman hasil analisis penelitian, dan sub-bab kedua yang berisi saran dari penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temuan penelitian terkait dengan topik yang peneliti kaji.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Pada Pasal 1313 KUHPer pengertian perjanjian merupakan segala suatu perbuatan yang melahirkan akibat hukum. Dengan adanya perikatan maka menimbulkan adanya pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perjanjian merupakan bentuk instrument yang dapat mempertemukan kepentingan yang berbeda antara dua pihak atau lebih, dengan adanya pengikatan diri dan mengakibatkan adanya suatu perjanjian maka terdapat pemenuhan kepentingan yang berbeda yang berasal dari pelaksanaan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat.

1.7.1.2 Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Perjanjian dapat terlahir akibat adanya pengikatan diri yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHP. Perjanjian dapat terlaksana dan dikatakann sah sebagai suatu perjanjian ketika terdapat unsur-unsur yang terpenuhi. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹¹

1. Kesepakatan Para Pihak, perjanjian dapat dipenuhi hak dan kewajibannya ketika terdapat adanya kesepakatan oleh para pihak. Seluruh pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut harus memiliki kesepakatan atau menyetujui hal yang sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan, kehilafan, ataupun penipuan.
2. Kecakapan Hukum ialah telah memiliki kapasitas pemahaman hukum yang cukup, yang mana di Indonesia setiap orang yang telah dikatakan sebagai cakap hukum ketika individu tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah.

¹¹ Cathleen Lie, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, dan Mia Hadiati, "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, No.7, Vol.1, Juni 2023, hlm. 4

Dalam suatu perjanjian harus dilakukan oleh seseorang yang telah cakap hukum, karena pada suatu perjanjian terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

3. Objek yang Diperjanjikan, dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih harus terdapat objek yang jelas, dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak bertentangan dengan hukum.
4. Sebab yang Halal, pembentukan suatu perjanjian terjadi akibat adanya kepentingan yang dimiliki oleh tiap pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut yang kemudian memutuskan untuk mengikatkan diri untuk mendapatkan suatu pencapaian yang sama dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Suatu perjanjian telah sah apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian. Unsur-unsur didalam perjanjian merupakan suatu hal esensial pada perjanjian. Pelaksanaan muatan perjanjian, yakni pemenuhan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak lain kepada pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian menentukan isi serta pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian yang sah secara hukum dan tidak melanggar norma, tidak dapat diubah ataupun dibatalkan secara sepihak.

1.7.1.3 Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dikalsifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan oleh berbagai aspek. Berikut merupakan jenis-jenis perjanjian yang terdapat di Indonesia sebagai beriku:¹²

1. Berdasarkan bentuknya.

Perjanjian dikalsifikasikan berdasarkan dengan bentuknya didasarkan pada pembuatan awal perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak yang terkait pada perjanjian tersebut. Terdapat dua perjanjian yang di klasifikasikan berdasarkan dengan bentuknya yakni perjanjian tertulis dan perjanjian atau tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis yakni suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang tergabung di dalamnya dengan dijadikan sebagai dokumen perjanjian disertai dengan seluruh tandatangan tiap pihak yang terlibat didalamnya. Dalam perjanjian ini sering digunakan dalam transaksi yang memiliki nilai yang cukup besar dan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Sebagai contoh kontrak bisnis, perjanjian kerja, perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian secara

¹²“Macam-macam Perjanjian dan Syarat Sahnya.”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2025

tertulis atau berbentuk dokumen perjanjian memiliki suatu keuntungan yang dapat digunakan ketika terdapat sengketa di dalamnya, yang mana dokumen perjanjian memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dibanding dengan perjanjian secara lisan, mengurangi adanya resiko perselisihan atau sengketa karena segala ketentuan telah tertuang didalam dokumen perjanjian, selain itu dokumen perjanjian juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ketika suatu hari terdapat sengketa.

Perjanjian Lisan, merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara verbal tanpa adanya dokumen tertulis. Perjanjian secara lisan ini tetap dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah sepanjang telah memenuhi seluruh unsur-unsur didalam perjanjian. Perjanjian lisan ini sering dilakukan atau dibuat untuk melakukan suatu perjanjian yang tidak memiliki resiko yang cukup signifikan. Contoh dari adanya perjanjian secara lisan ini ialah kesepakatan atau perjanjian jual beli yang dilakukan pada sebuah gerai atau pasar. Namun, perjanjian secara lisan ini memiliki kelemahan ketika terdapat suatu sengketa yang terjadi didalamnya, yang mana perjanjian secara lisan ini sulit untuk dibuktikan jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan dan perjanjian secara lisan ini memiliki resiko adanya perbedaan pemahaman

antara tiap pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2. Berdasarkan sifatnya.

Sifat perjanjian mengacu pada keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Terdapat perjanjian sepihak yang mana dalam perjanjian ini hanya terdapat satu pihak yang memiliki kewajiban setelah perjanjian dibuat, yang mana pihak lain yang terdapat pada perjanjian tersebut hanya menerima manfaat dari terlaksanannya perjanjian tersebut. Contoh dari adanya perjanjian sepihak ialah hibah dan wasiat. Dalam pelaksanaan perjanjian sepihak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian yang lainnya, yang mana hanya terdapat satu pihak yang harus melakukan kewajiban dalam perjanjian tersebut, kemudian penerima tidak memiliki kewajiban untuk membalas atau memberi timbal balik atas tindakan tertentu dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian timbal balik, merupakan Suatu bentuk kesepakatan di mana setiap pihak memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang antara satu dengan lainnya. Contoh dari perjanjian semacam ini adalah transaksi jual beli dan perjanjian sewa menyewa, yang mana dalam perjanjian timbal balik ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian sepihak, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang wajib

dipenuhi dan jika terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dapat menuntut haknya sesuai dengan perjanjian.¹³

3. Berdasarkan Cara Pelaksanaannya.

Perjanjian dibedakan berdasarkan pada pelaksanaannya mengacu pada kapan perjanjian yang dilakukan tersebut dianggap sah dan mulai berlaku. Perjanjian konsensual merupakan suatu perjanjian yang dianggap sah dan mengikat sejak suatu kesepakatan terjadi antar pihak, tanpa adanya penyerahan barang ataupun objek perjanjian terlebih dahulu. Contoh dari adanya perjanjian konsensual ini ialah perjanjian jual beli yang mana ketika pembeli dan penjual telah menyepakati adanya harga dan spesifikasi barang, perjanjian telah sah meskipun barang belum diserahkan. Dalam perjanjian konsensual ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang mana perjanjian telah dikatakan sah sejak kesepakatan telah dicapai.

Perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru dianggap sah ketika objek yang dijadikan sebagai objek perjanjian telah diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Seperti halnya perjanjian mengenai pinjaman meminjam dan gadai,

¹³ Sri Wulandari, Hartono, Zulkifli. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA", *The Juris*, 2024

yang mana perjanjian baru dikatakan sah dan berlaku ketika barang telah diserahkan. Dalam perjanjian riil ini tidak hanya menggunakan kesepakatan namun juga dibarengi oleh adanya penyerahan barang atau objek yang diperjanjikan, dan terdapat beberapa perjanjian riil yang dibarengi oleh penyerahan dokumen perjanjian untuk ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan.

1.7.2 Tinjauan Tentang Kontrak

1.7.2.1 Pengertian Tentang Kontrak di Indonesia

Dalam penyusunan kontrak secara tertulis sering disebut dengan istilah *agreement* yang berarti persetujuan atau pemufakatan. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tidak hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi juga mencerminkan adanya pengertian untuk melaksanakan sesuatu di waktu yang akan datang oleh satu atau kedua belah pihak. Kontrak dalam hukum Indonesia khususnya pada KUHPer disebut dengan *overeenkomst* yang bermakna kontrak dalam terjemahan Indonesia.

Pada dasarnya kontrak memiliki makna sama dengan perjanjian atau persetujuan, hal ini dapat terlihat pada Buku III Bab kedua mengenai perikatan- perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Pengertian kontrak juga terdapat pada Pasal 1313 KUHPer. Y. Sogar Simamora, berpendapat bahwa perhatian utama proporsionalitas adalah keseimbangan dalam pembagian tanggung

jawab. Yang mana dalam suatu perjanjian kontrak melahirkan akibat hukum di dalamnya hukum pada kontrak digunakan sebagai mensyaratkan seluruh pihak yang terlibat didalamnya memberikan jaminan untuk memastikan pelaksanaan suatu perjanjian kontrak tersebut.

1.7.2.2 Unsur-unsur dalam Kontrak

Kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat ketika terdapat unsur-unsur yang telah terpenuhi sesuai dengan hukum perdata di Indonesia. Berikut merupakan unsur-unsur yang wajib terpenuhi dalam suatu kontrak:¹⁴

a. Kesepakatan Para Pihak

Kontrak yang disusun oleh dua pihak atau lebih harus dilaksanakan secara sukarela oleh seluruh pihak yang terlibat pada kepentingan perjanjian kontrak tersebut tanpa adanya unsur paksaan, penipuan ataupun kekeliruhan dalam kontrak yang akan merugikan satu pihak. Dengan adanya kesepakatan maka kontrak atau perjanjian yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan sah secara hukum.

b. Kecakapan Hukum Para Pihak

Kecakapan hukum para pihak yang dimaksudkan ialah para pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam kontrak

¹⁴ Lie. C, Clarosa, V., Yonatan. Y, dan Hadiati. M, "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Juni 2023. Hlm.4

tersebut harus memiliki kapasitas hukum atau kedewasaan dan tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan hukum. Hal ini termasuk dalam unsur sah nya suatu kontrak, karena perjanjian dapat terlaksana dengan baik ketika seluruh pihak dapat memahami isi dari kontrak tersebut.

c. Objek yang Diperjanjikan

Terdapat keinginan atau tujuan yang menjadi kepentingan beberapa pihak dan dapat dijalankan bersama-sama akan membentuk suatu kontrak atau perjanjian, yang mana setelahnya akan menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Namun dalam pembuatan suatu perjanjian tidak seluruhnya mengakibatkan adanya akibat ataupun konsekuensi hukum, saat pembentukan perjanjian oleh suatu pihak hanya menimbulkan kewajiban sosial untuk memenuhi janji tersebut. Dengan adanya objek yang diperjanjikan dalam kontrak maka dapat mengubah kewajiban sosial menjadi lahirnya suatu akibat hukum. Namun, dalam penentuan objek tersebut terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi seperti jelas dan dapat ditentukan serta tidak bertolak belakang dengan hukum, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.

1.7.2.3 Jenis-jenis Kontrak

Kontrak atau perjanjian pada umumnya bebas untuk ditentukan secara pribadi oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak perjanjian tersebut. Namun, terdapat beberapa jenis kontrak perjanjian yang

diatur khusus oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta memberikan kejelasan mengenai pengaturan kontrak perjanjian tersebut. Terdapat beberapa peristiwa kontrak perjanjian yang telah diatur secara tegas oleh undang-undang, dan akta menjadi suatu syarat sah mutlak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Seperti halnya kontrak perjanjian pendirian perseroan terbatas, jaminan fidusia, serta pemisahan dan pembagian harta warisan dalam situasi tertentu.

Kontrak jika diklasifikasikan berdasarkan dengan berbagai aspek, kontrak juga dapat ditentukan berdasarkan dengan pembentukannya yang mana kontrak dapat dilakukan secara tertulis menggunakan dokumen resmi sesuai dengan undang-undang untuk memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat seperti kontrak kerja dan sewa. Selain itu kontrak juga dapat di klasifikasikan menurut tujuan pembentukannya, terdapat kontrak komersial yang biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha seperti kontrak franchise dan distribusi. Kemudian terdapat juga pembentukan kontrak dengan tujuan perdata yang mana dalam kontrak ini mengatur mengenai hubungan antar individu yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, seperti halnya kontrak sewa rumah antara pemilik dengan penyewa perorangan.

1.7.3 Tinjauan Tentang Asas didalam Kontrak

1.7.3.1 Pengertian Asas Hukum di Indonesia

Asas dalam pembentukan suatu peraturan memiliki peran sebagai pedoman ataupun arahan orientasi berdasarkan dengan hukum yang sesuai untuk diterapkan. Dapat dikatakan bahwa asas hukum adalah sumber dari pembentukan peraturan hukum dengan diringi nilai-nilai etis, moral, serta sosial masyarakat. Asas-asas yang terkandung didalam suatu peraturan atau hukum yang berlaku tidak hanya digunakan sebagai pedoman ketika terjadi suatu permasalahan atau isu hukum yang sulit, namun juga digunakan sepanjang hukum atau peraturan tersebut diterapkan.¹⁵

1.7.3.2 Asas-asas dalam Kontrak

Pembuatan kontrak terdapat asas-asas didalamnya, yang mana asas tersebut merupakan suatu pedoaman yang digunakan dalam penerapan kontrak perjanjian tersebut dan kontrak perjanjian dapat dikatakan sah ketika terdapat unsur-unsur asas di dalamnya. Pada hukum kontrak perjanjian memuat beberapa asas yang biasanya digunakan dalam pembentukan maupun penerapan kontrak tersebut, berikut merupakan asas-asas dalam kontrak perjanjian :¹⁶

¹⁵ Ghea Kiranti M.S. Max.S dan Josina E.L. Tinajauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian, *Ejoernal Unsrat*, 2022.

¹⁶ Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, : Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9. Dikutip dari Ghea Kiranti M.S. Max s. dan Josina E.L. Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian, *ejoernal unsrat*, 2022

1. Asas Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang membebaskan para pihak yang terlibat di dalam kontrak perjanjian untuk menentukan isi, bentuk, serta jenis perjanjian yang akan dibuat. Namun dengan syarat tidak bertolak belakang dengan isi undang-undang dan kesusilaan yang berlaku. Sesuai yang telah tercantum pada buku III KUHPer mengenai perikatan yang menganut sistem terbuka yang mana memungkinkan untuk para pihak yang terlibat dapat menentukan isi dari kontrak perjanjian yang disetujui dan menghasilkan hubungan hukum diantara para pihak. Berdasarkan dengan apa yang telah tercantum didalam pasal 1338 ayat (1), maka setiap orang yang memiliki hubungan hukum akibat adanya keterlibatan atau keterikatan dalam suatu perjanjian dapat menentukan isi dari perjanjiannya sendiri selama tidak bertolak belakang dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Kebebasan dalam pembentukan kontrak perjanjian ini dapat digunakan serta ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk menentukan objek perjanjian, menyusun atau tidak menyusun perjanjian, pihak pembuat perjanjian, dan kebebasan menentukan atau memilih kausa sebagai prinsip hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini tidak bersifat mutlak dalam KUHPer terdapat pengaturan pembatasan mengenai asas kebebasan berkontrak ini.

2. Asas Konsensualitas (*Consensualism*)

Asas Konsensualisme ialah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir atau tercipta sejak tercapainya suatu kesepakatan antar pihak yang terlibat di dalamnya mengenai hal pokok esensial dalam perjanjian. Sesuai yang telah tertuang pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPer, bahwa syarat sah suatu perjanjian ialah letika adanya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

3. Asas *Pascta Sunt Servenda*

Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi tiap pihak yang membuatnya. Pengaturan tentang Asas *Pasca Sunt Servenda* ini terdapat pada pasal 1338 ayat (1). Dengan ini dapat diartikan bahwa seluruh isi perjanjian yang telah dibuat secara sah dan telah disepakati oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang, yang mana seluruh pihak yang ada di dalam kontrak perjanjian tersebut harus mentaati dan melakukan isi perjanjian yang disepakati.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik ini mewajibkan tiap pihak yang terlibat dalam untuk bertindak jujur dan adil, serta saling menjaga dan mempercayai satu sama lain antar pihak. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3). Dalam bahasa Belanda itikad baik disebut dengan *te goeder trouw* yang memiliki makna kejujuran.

Itikad baik dalam suatu kontrak dibedakan menjadi 2 (dua) atas pemberlakuannya, yakni yang pertama itikad baik dapat dilakukan saat diawal akan melaksanakan perjanjian dan yang kedua itikad baik juga dapat dilakukan ketika proses kontrak dilaksanakan dengan melaksanakan hak-hak serta kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut.¹⁷

5. Asas Personalitas (*Personality*)

Asas personalitas ini memaparkan bahwa perjanjian hanya mengikat tiap pihak yang terlibat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Sesuai yang telah diatur dalam Pasal 1340 KUHPer. Yang mana jelas bahwa dalam pasal tersebut menyatakan pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk mengerjakan isi perjanjian yang dibuat ialah pihak yang ikut serta dalam pembuatan kontrak perjanjian tersebut. Dengan hal ini dalam implikasi pelaksanaannya maka hanya tiap pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak perjanjian tersebut yang berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat. Dan pihak ketika tidak dapat menuntut ataupun dituntut berdasarkan dengan isi perjanjian tersebut.

6. Asas Keseimbangan (*Equilibrium*)

Asas keseimbangan ini menghendaki lahirnya keseimbangan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, hlm. 69, dikutip dari Ghea Kiranti M.S. Max s. dan Josina E.L. Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian, ejoernal unsrat, hlm. 9, 2022

antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh tiap pihak dalam perjanjian yang dibuat. Maka tiap pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut harus memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang mendominasi dalam proses perjanjian tersebut. Asas keseimbangan ini dilandaskan dengan adanya upaya untuk mencapai keadaan yang seimbang. Dengan ini agar asas keseimbangan dapat terlaksana dengan baik, maka perjanjian yang dilakukan tidak boleh memuat mengenai klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak yang terlibat perjanjian tersebut secara tidak adil.

7. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas kepastian hukum ini menghendaki bahwa dalam setiap kontrak perjanjian yang dibuat memiliki kepastian hukum, yaitu adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi mengenai hak dan kewajiban tiap pihak yang terlibat dalam kontrak perjanjian tersebut. Dengan ini agar terlaksananya asas kepastian hukum, maka klausul-klausul dalam kontrak perjanjian yang dibuat harus disebutkan dan dijelaskan secara terperinci agar dapat menghindari adanya makna ambiguitas yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antar pihak.